

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era perekonomian global dewasa ini seluruh aspek perekonomian dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar tetap unggul dalam persaingan. Begitu juga dengan koperasi yang merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang untuk kepentingan bersama. Koperasi merupakan bentuk perekonomian yang sesuai dengan budaya bangsa yaitu gotong-royong. Dengan semangat gotong-royong ini seharusnya tujuan koperasi dengan mudah bisa dicapai. Adapun tujuan utama koperasi adalah untuk mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, koperasi dinyatakan sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Adanya dukungan yang positif dari pemerintah pada masa itu, Jawatan koperasi mengadakan pendaftaran koperasi dan tercatat 2500 buah koperasi di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan awal perkembangan yang sangat baik bagi koperasi di Indonesia. Koperasi berlandaskan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan untuk memberdaya pengusaha kecil dan menengah/UMKM agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional

mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan bermuara koperasi.

Kinerja koperasi diartikan sebagai suatu ketercapaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* yang berarti prestasi kinerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang (Bulandari,2015). Dengan demikian, pengukuran kinerja koperasi merupakan suatu upaya yang diambil para pemangku kepentingan untuk menentukan/menilai pencapaian suatu strategi terhadap suatu taget. Untuk mencapai suatu keberhasilan kinerja harus adanya faktor pendukung diantaranya adalah *good corporate governance*.

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten penggerak koperasi. Kabupaten Badung telah menjalankan serta mengembangkan perkoperasian secara luas, bahkan Kabupaten Badung telah mendapatkan penghargaan sebanyak dua kali yaitu penghargaan di bidang koperasi berupa Paramadana Utama Nugraha Koperasi. Penghargaan Kabupaten Penggerak Koperasi dan memberikan Sertifikasi terhadap pengurus koperasi di Kabupaten Badung. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Pemerintahan Kabupaten Badung, Adapun kriteria sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi antara lain: lebih dari 55% koperasi berkualitas, 75% koperasi aktif, peran pemerintah dan kontribusi pemerintah terhadap pemberdayaan koperasi, implementasi keberpihakan pemerintah terhadap pemberdayaan koperasi, dan perkembangan kinerja koperasi (versi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung).

Walaupun telah dinobatkan sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi, nyatanya pada akhir tahun 2022 jumlah koperasi yang aktif sebanyak 543 dari jumlah total koperasi yang ada di Kabupaten Badung sebanyak 609 koperasi. Sejumlah koperasi di Badung banyak yang tidak sehat, karena banyak koperasi di Badung yang belum melaksanakan RAT. Koperasi di Kabupaten Badung dipandang sangat lambat dalam melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2021. Pasalnya sampai akhir Maret 2022 masih ada ratusan koperasi di Kabupaten Badung tidak melaksanakan RAT. Hal itu pun membuat Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Badung kecewa lantaran koperasi tidak menyelesaikan kewajiban, jika terus tidak melakukan RAT disinyalir koperasi akan bermasalah dan seakan tidak transparansi. Sesuai anggaran dasar koperasi dan Permenkop Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2015 dan pasal 26 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 setiap koperasi wajib melaksanakan RAT (Tribun-Bali.com Jumat, 1 April 2022).

Tahun buku 2021 telah berakhir dan sesuai anggaran dasar koperasi dan Permenkop wajib melaksanakan RAT, sehingga tidak ada alasan pengurus Koperasi tidak melakukan RAT. Sebab, RAT sebagai salah satu indikator koperasi dalam keadaan sehat. RAT wajib dilakukan di awal tahun terkait dengan laporan keuangan kepada anggota. Kiriteria koperasi yang sehat yaitu koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu, jika tidak tepat waktu akan dicatat bahwa koperasi tersebut tidak tepat waktu. Kriteria koperasi yang aktif ada empat yaitu koperasi sehat, koperasi cukup sehat, koperasi dalam pemantauan dan koperasi dalam pemantauan khusus (diskopukmp.badungkab.go.id). Di kecamatan Abiansemal sendiri terdapat 143 koperasi 39 koperasi (27,27 persen) telah melaksanakan RAT (Balipost, Jumat 6 Mei 2022).

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Sasaran dan program pemerintah kabupaten Badung yang dilaksanakan melalui proses pembangunan 5 (lima) tahunan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan serta daya saing daerah. Dari potensi yang ada Dinas Koperasi menargetkan di akhir periode 5 (lima) tahun, menetapkan target capaian indikator utama dan pendukung sebagai berikut:

- 1) Persentase Koperasi Sehat sebesar 7 % (Tahun 2022), 8 % (Tahun 2023), 9 % (Tahun 2024), 10 % (tahun 2025), dan sebesar 11 % (Tahun 2026)
- 2) Persentase Koperasi Aktif sebesar 89,39 % (Tahun 2022), 89,6 % (Tahun 2023), 89,7 % (Tahun 2024), 89,98 % 9Tahun 2025) dan 90,4 % (Tahun 2026)

Berdasarkan atas potensi yang dimiliki serta hasil atau harapan yang diinginkan dalam 5 (lima) Tahun ke depan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dihadapkan berbagai permasalahan dan isu strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan internal berkaitan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, sarana dan prasarana pendukung sedangkan permasalahan yang bersifat eksternal adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia pengelola Koperasi. Dengan demikian, maka kekuatan dan kelemahan berbagai sumber daya yang ada yang berpengaruh secara internal maupun eksternal berupa peluang dan ancaman perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan terhadap Koperasi (diskopukmp.badungkab.go.id).

Koperasi dikelola secara terpisah dengan para anggotanya sehingga memungkinkan terjadinya konflik keagenan. Menurut Shil (2008), konflik keagenan

muncul ketika orang-orang dalam posisi berbeda mengorbankan tujuan lebar perusahaan untuk mewujudkan kepentingan pribadi. Untuk memperkecil munculnya konflik keagenan maka diperlukannya pengelolaan usaha (*Corporate Governance*) yang baik yang diharapkan mampu memperkecil jurang pemisahan antara agen dan prinsipal. Suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik sering disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG). *Good corporate governance* adalah suatu tata kelola untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas perusahaan (Chaarani, 2014). GCG adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dan melindungi kepentingan *stakeholder* dengan cara mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan juga menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaannya (Aggarwal, 2013). GCG memainkan peran kunci dalam meningkatkan integritas dan efisiensi perusahaan, serta pasar keuangan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Halimatusadiah dkk. (2015) menyatakan bahwa GCG berkaitan dengan hukum maupun aturan yang memungkinkan perusahaan untuk menggunakan modal dan sumber daya manusia secara efisien sehingga mampu memberikan nilai kepada *shareholder* dan masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

Good corporate governance menurut Thomas (2006) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambahan (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Menurut Purwani (2010), jika pelaksanaa *good corporate governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh aktifitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga kinerja perusahaan baik yang bersifat finansial maupun non finansial akan juga turut membaik. *Good corporate governance* memiliki beberapa prinsip, dan prinsip prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Bulandari,2015).

Transparansi sangatlah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Evi (2018), Utari dan Yeni (2017), menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian Novatiani (2019) dan Daniel (2014) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai perusahaan. Namun transparansi juga memiliki pengaruh yang kurang baik terhadap kinerja perusahaan hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dito (2018) dan Erick (2018) bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah dan hasil yang bertentangan diperoleh oleh Desi dan Pande (2017), Rosy (2014) bahwa tranparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Akuntabilitas dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, akuntabilitas merupakan pemberian pertanggungjawaban kepada anggota perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dan sehingga terbentuknya kondisi saling mengawasi di dalam suatu perusahaan, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, teratur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Menurut penelitian sebelumnya dilakukan oleh Utari dan Yeni (2017), Desi dan Pande (2017), Daniel (2014) hasil penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Erick (2018) dan Dito (2018) hasil penelitiannya menyatakan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai, dan

menurut penelitian yang dilakukan oleh Rosy (2014) bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan perusahaan.

Selanjutnya tanggung jawab yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, tanggung jawab merupakan keharusan perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Diah dan Asri (2016), Numaria dan Restu (2015) menyatakan bahwa tanggung jawab berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2016) menemukan bahwa adanya pengaruh negatif terhadap kinerja (PT Pos Indonesia Persero) dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Pande (2017) bahwa tanggung jawab tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Faktor selanjutnya adalah independensi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, independensi adalah bentuk suatu perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manapun. Dalam melaksanakan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmaria dan Restu (2015), Desi dan Pande (2017), Diah dan Asri (2016) menyatakan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2016) menyatakan bahwa independensi berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Krishna (2017) bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Faktor kewajaran dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena kewajaran adalah suatu perusahaan yang harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya, berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, penelitian yang dilakukan oleh Diah dan Asri (2016), Numaria dan restu (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Pande (2017) bahwa kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Good corporate governance memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan penentuan visi dan misi koperasi dan merupakan sarana untuk memilih teknik monitoring kinerja. *Good corporate governance* juga meberikan jaminan keuntungan dan keamanan atas dana yang ditanamkan di koperasi tidak akan digelapkan oleh pengelola koperasi. Keberadaan dan perkembangan koperasi sangat erat kaitannya dengan program dan peran pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial di setiap-setiap desa. Kecamatan Abiansemal merupakan wilayah pembangunan yang meberikan dampak perubahan-perubahan baik dari segi fisik maupun sosial ekonomi yang dianggap memiliki prospek untuk maju. Untuk mengantisipasi adanya hal yang bersifat negatif akibat proses pembangunan maka diperlukan adanya perangkat dan kelembangaan yang bersifat daerah yang mampu membantu masyarakat setempat dan diharapkan menjadi modal untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan kinerja LPD. Oleh karena

itu, Prinsip-prinsip *good corporate governance* sangat diperlukan di dalam koperasi agar dapat meningkatkan kinerjanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Abiansemal?
- 2) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Abiansemal?
- 3) Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Abiansemal?
- 4) Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Abiansemal?
- 5) Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Abiansemal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Abiansemal.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Abiansemal.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh responsibilitas terhadap kinerja koperasi di Kecamatan Abiansemal.

- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Abiansemal.
- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kewajaran terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Abiansemal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, seperti berikut ini:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti secara empiris terhadap keagenan yaitu menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak antar pihak principal dengan pihak agen, yang mana pihak agen memberikan pelayanan dan tanggung jawab kepada pihak principal dan untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal, pemilik perusahaan dapat membatasi perbedaan kepentingannya dengan menetapkan intensif yang tepat bagi agen, dan dengan menimbulkan biaya monitoring, rancang untuk membatasi tindakan agen secara teoritis. Dan memberikan tambahan suatu ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja koperasi di Kecamatan Abiansemal. Penelitian yang dilakukan juga diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memberikan sumbangan gagasan sebagai pertimbangan

dalam mengembangkan koperasi dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu meningkatkan kualitas yang bagus untuk meningkatkan kinerja sehingga mutu dan tujuan koperasi yang diharapkan dapat terwujud.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian. Landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Teori keagenan merupakan pemisahan kepemilikan (*principal*) dan pengelolaan perusahaan (*agent*) yang akan mendorong setiap pihak berusaha memaksimalkan kesejahteraan masing – masing. Pemilik akan mendorong manajer agar mau bekerja lebih keras dengan menggunakan berbagai intensif untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Dalam penelitian ini teori keagenan dapat terjadi dalam koperasi karena pada umumnya pengelolaan koperasi dilakukan oleh pengurus sementara anggota hanya sebagai pemilik dan pengguna jasa. Konflik keagenan dapat diminimalisir dengan menerapkan praktik *good corporate governance* yang kemudian akan meningkatkan kinerja perusahaan (Azeez, 2015). Oleh karena itu penerapan tata kelola suatu organisasi perlu ditingkatkan guna mengatasi masalah dalam teori keagenan (Peni dkk., 2013).

2.1.1 Teori Keagenan

Mecking dan Jemen (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak antar pihak principal dengan pihak agen, yang mana pihak agen memberikan pelayanan dan tanggung jawab kepada pihak principal. Menurut Eisenhardt (1989) teori keagenan merupakan hubungan keagenan, yang mana pihak

principal memberikan pihak agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal. Menurut teori keagenan, pemilik perusahaan dapat membatasi perbedaan kepentingannya dengan menetapkan intensif yang tepat bagi agen, dan dengan menimbulkan biaya monitoring, rancang untuk membatasi tindakan agen (Hill dan Jones, 1992). Menurut Reny (2012), para manager diberi kekuasaan oleh pemilik, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, yang dapat menciptakan konflik kepentingan yang dikenal dengan teori keagenan (*Agency theory*).

Tujuan utama dengan adanya teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir cost sebagai dampak adanya informasi yang tidak simentris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian (Eka, 2011). Teori keagenan menggambarkan bahwa perusahaan merupakan suatu titik temu antara pemegang saham dan manajer. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kemakmuran harga saham yang diterjemahkan sebagai memaksimalkan harga saham. Dalam kenyataan tidak jarang manajer mempunyai tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama tersebut karena manajer diangkat oleh pemegang saham maka idealnya mereka bertindak yang terbaik untuk pemegang saham. Namun dalam prakteknya sering terjadi konflik antar belah pihak tersebut yang dinamakan *agency problem* (Utari, 2016).

Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para anggota dan nasabah yakin bahwa pengelolaan koperasi tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanam oleh para anggota dan nasabah, dan berkaitan dengan bagaimana para anggota dan nasabah mengontrol para pengelola koperasi, dengan

kata lain *Corporate Governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2.1.2 *Good Corporate Governance*

Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Good Corporate Governance* yang di keluarkan oleh beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholder*), namun pada umumnya menuju suatu dan pengertian yang sama. Menurut Oliver (1995), *corporate governance* muncul dalam organisasi disebabkan karena adanya masalah agensi, atau konflik kepentingan, yang melibatkan anggota organisasi.

Menurut *Organizational for economic co-operation and Development* (OECD, 1999), *corporate governance* merupakan elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksinya (dewan direksi dan komisaris, untuk negara–negara yang menganut sistem hukum *two–tier* termasuk Indonesia), para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. *Good corporate governance* harus memberikan insentif yang tepat untuk dewan direksi dan manajemen dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan dari sisi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham dan juga harus dapat memfasilitasi monitoring yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara efisien.

Konsep GCG mengacu pada peraturan dan standar yang mendefinisikan hubungan antara manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan seperti karyawan, pemasok, kreditur, konsumen, pemegang saham, pemegang oligasi (Kim, 2006). Menurut Thomas (2006), *good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan

perusahaan yang menciptakan nilai tambahan (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Sheifer and Vishny (1997) menyatakan *corporate governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Menurut Purwani (2010), jika pelaksana *good corporate governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga kinerja perusahaan baik yang bersifat finansial maupun non finansial akan juga turut membaik.

2.1.3 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan sistem *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai tambahan bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai, dan *stakeholders* dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
- 2) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholder* dan *stakeholders*.

Menurut Forum *for Corporate Governance in indonesia* (FCGI, 2001) dengan melaksanakan *corporate governance*, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta lebih meningkatkan layanan kepada *stakeholders*. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah.
- 2) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 3) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Dengan *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, akan tetapi ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari, dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

2.1.4 Faktor-faktor Penerapan *Good Corporate Governance*

- 1) Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di antaranya:

- a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b) Dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean governance* menuju *good governance* yang sebenarnya.

- c) Terdapatnya contoh pelaksanaan *good corporate governance* yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standard pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).
- d) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *good corporate governance* di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi *good corporate governance* secara sukarela.
- e) Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi *good corporate governance* terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang dilingkungan publik di mana perusahaan peroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

2) Faktor Internal

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan praktek *good corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- a) Terdapat budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme serta kerja manajemen di perusahaan.
- b) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dilakukan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *good corporate governance*.

- c) Manajemen pengendalian resiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standard *good corporate governance*.
- d) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk memahami setiap gerakan dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap deret langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.5 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Good Corporate governance memiliki beberapa prinsip, dan prinsip-prinsip *good corporate governance* ini dipastikan dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Menurut pedoman umum *good corporate governance* Indonesia (2016) memiliki prinsip sebagai berikut:

1) Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, prinsip ini mewajibkan perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, jelas dan akurat sehingga mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan

haknya. Karena dengan tersedianya informasi yang tepat waktu, maka masyarakat pada umumnya dan pihak berkepentingan lain dapat sekaligus mengawasi perusahaan. Sehingga kebijakan yang dibuat dapat mencegah terjadinya kecurangan. Begitu pula apabila perusahaan menerapkan prinsip transparansi maka akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder*.

2) Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dengan cara melaksanakan pedoman pokok pelaksanaannya, dimana perusahaan harus menetapkan rincian dan tugas dari masing-masing organisasi.

Dan juga perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelola perusahaan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dalam menjamin kewenangan yang searah pada pencapaian tujuan yang secara luas dengan tingkat efesiensi, efektifitas dan kejujuran sehingga dengan itu kepercayaan *stakeholder* akan menjadi meningkat.

3) Responsibilitas

Responsibilitas tanggung jawab setiap individu maupun organisasi atau perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugasnya dalam pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan

bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka waktu panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Sehingga dalam konsep ini, organisasi atau perusahaan harus mempertanggung jawabkan segalan hal yang berkaitan dengan aturan, hukum dan peraturan yang berlaku sebagai kontribusi hubungan hierarki internal perusahaan, pemangku kepentingan, masyarakat serta *stakeholder* lainnya. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

4) Independensi

Independensi sikap perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manapun. Dalam melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain dan juga dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi perusahaan yang dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya.

Dalam hal ini organisasi atau perusahaan harus memiliki tata kelola yang efektif dan efisien dan mampu melakukannya sendiri tanpa ada dominasi dari pihak lain, serta mampu dalam menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilai yang ada pada organisasi atau perusahaan itu sendiri, untuk dapat dijadikan *unique point* diantara organisasi dan perusahaan lainnya. Maka untuk melancarkan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, perusahaan harus

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Artinya perusahaan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan *Stakeholders* lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan porisnya masing-masing. karena setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi untuk organisasi atau perusahaan.

Sehingga kewajaran ini sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan atau sebagai motivasi bagi setiap bagian dari organisasi atau perusahaan, karena mereka akan memiliki rasa dan kesempatan yang sama dalam memberikan kontribusi kepada organisasi. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.6 Kinerja Koperasi

Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan dengan perusahaan lainnya. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk penetapan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja

perusahaan merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian efektif. Yang terdiri dari indikator kinerja yaitu:

1) Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada (Barlian, 2003). Pimpinan perusahaan atau manajemen sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang telah dianalisis, karena hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan datang.

Dengan menggunakan analisis rasio, berdasarkan data dari laporan keuangan, akan dapat diketahui hasil-hasil finansial yang telah dicapai di waktu-waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik. Kinerja keuangan biasanya diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dan analisis CAMEL.

2) Kinerja Manajemen

Kinerja Manajemen adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Kinerja manajemen bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan, dan juga di area yang lain. Baik di tingkat organisasi ataupun individu,

salah satu fungsi kunci dari manajemen adalah mengukur dan mengelola kinerja. Kinerja manajemen dapat diukur dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen.

Penilaian kinerja koperasi sangat penting untuk setiap *stakeholders* koperasi yaitu manajemen koperasi, nasabah, anggota koperasi. koperasi yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang, sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat dan calon anggota kepada koperasi yang bersangkutan.

Kinerja koperasi sendiri terkait erat dengan Tingkat Kesehatan koperasi. Kinerja koperasi dikatakan baik pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan berpredikat sehat. Kondisi koperasi seperti yang tertuang dalam peraturan Menteri Koperasi Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Penilaian kesehatan koperasi di tinjau dari beberapa aspek yakni aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Masing-masing diberi skor dan bobot yang telah ditentukan. Selanjutnya dapat ditentukan tingkat kesehatan koperasi yang meliputi aspek:

a) Permodalan

Pasal 41 Undang –Undang Pekonomian number 25 tahun 1992 disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Modal Pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya dan atau anggotanya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lainnya

yang sah. Aspek pertama penilai kesehatan koperasi adalah permodalan penilaian permodalan dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan asset dan rasio kecukupan modal.

b) Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktifa produktif dinilai atas dasar penggolongan kolektibilitas yang terdiri atas lancar, kuarng lancar, diragukan dan macet. Kemudian untuk menutupi kemungkinan risiko kerugian maka koperasi membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.

c) Manajemen

Padasarnya manajemen koperasi tidak jauh berbeda dengan manajemen perusahaan perdagangan dan perusahaan nonbank yang lain. Fungsi manajemen perusahaan berikut juga diterapkan dalam manajemen koperasi. Manajemen menunjukan pada orang berati berkaitan dengan para pengelola yang ada dalam organisasi, kaitanya dengan koperasi berati menunjuk pada apa yang sering kita sebut perangkat organisasi koperasi. Menurut UU No .25 Tahun 1992, yang termasuk perangkat organisasi adalah rapat anggota, pengurus dan pengawasan. Penilain aspek manajemen meliputi beberapa komponen yaitu manajemen umum, kelembagaan, manejemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas.

d) Efisiensi

Rasio ini menggambarkan sampai seberapa besar koperasi mampun memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya, sebagai penggantinya ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur

keberhasilan perusahaan koperasi yang diperlukan dari penghematan biaya pelayanan.

e) Likuiditas

Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Dalam hal ini adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

f) Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek ini didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian oprasional. Dalam hal ini penilaian tingkat kesehatan koperasi terhadap kemandirian dan pertumbuhan.

g) Jatidiri Koperasi

Penilaian jatidiri koperasi, setelah perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud 1 sampai 7 aspek diatas, sehingga diperoleh skor secara keseluruhan. skor yang dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi yang dibagi dalam empat golongan yaitu, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009:

- a) 80 – 100 = Sehat
- b) 60 – 80 = Cukup Sehat
- c) 40 – 60 = Kurang Sehat
- d) 20 – 40 = Tidak Sehat
- e) ≤ 20 = Sangat Tidak Sehat

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian dengan topik yang sama telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut peneliti merangkum hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Yanti, dkk (2022), melakukan penelitian tentang Pengaruh Prinsip Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Mengwi. Dalam penelitian ini variabel bebas (X) yang digunakan yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran dan kinerja Lembaga perkreditan desa (LPD) sebagai variabel terikat (Y). Teknik analisis yang digunakan yaitu Teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu, variabel Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Sedangkan variabel Independensi dan Kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Handayani, dkk (2020), melakukan penelitian tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Dalam penelitian ini variabel bebas (X) yang digunakan yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran dan kinerja Lembaga perkreditan desa (LPD) sebagai variabel terikat (Y). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu, variabel akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif, terhadap kinerja LPD. Sedangkan variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Ariani, dkk (2020), melakukan penelitian tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Filosofi Tri Hita Karana Terhadap Kinerja LPD

Se-Kota Denpasar. Dalam penelitian ini variabel Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Filosofi Tri Hita Karana sebagai variabel bebas (X) dan kinerja Lembaga perkreditan desa (LPD) sebagai variabel terikat (Y). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD, sedangkan variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan filosofi tri hita karana tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Marlina (2019), melakukan penelitian tentang Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Koperasi Di Kota Pekanbaru, Riau. Dalam penelitian ini variabel Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran sebagai variabel bebas (X) dan kinerja koperasi sebagai variabel terikat (Y). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran) memiliki berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi.

Surachman, Sutardjo (2019), melakukan penelitian tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Di Purwakarta Indonesia. Dalam penelitian ini variabel Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran sebagai variabel bebas (X) dan kinerja Lembaga perkreditan desa (LPD) sebagai variabel terikat (Y). Teknik analisis data yang digunakan adalah PLS-SEM dengan software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas dan kewajaran berpengaruh

positif terhadap kinerja keuangan koperasi. Sedangkan variabel resposibilitas dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan koperasi.

Dewi, Yadnyana (2021), meneliti tentang Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Berbasis Balance Scorecard di LPD Kabupaten Badung. Dalam penelitian ini variabel Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran sebagai variabel bebas (X) dan kinerja berbasis balance scorecard sebagai variabel terikat (Y). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip responsibilitas berpengaruh positif, sedangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja berbasis Balanced scorecard.

Dhayana, Dwija (2020), meneliti tentang Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Gianyar. Dalam penelitian ini variabel Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan budaya organisasi sebagai variabel bebas (X) dan kinerja keuangan sebagai variabel terikat (Y). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari penerapan prinsip-prinsip good governance dan budaya organisai terhadap kinerja keuangan LPD di Kabupaten Gianyar.

Wisnu, Budi (2020), melakukan penelitian tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Dalam penelitian ini variabel Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran sebagai variabel bebas (X) dan kinerja keuangan Lembaga perkreditan desa (LPD) sebagai variabel terikat

(Y). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal.

Wahyuni, dkk (2021), melakukan penelitian tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Dalam penelitian ini variabel Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran sebagai variabel bebas (X) dan kinerja keuangan Lembaga perkreditan desa (LPD) sebagai variabel terikat (Y). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini yaitu, variabel responsibilitas dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Sedangkan variabel transparansi, akuntabilitas, dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

Astuti, dkk (2023), melakukan penelitian tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Utara. Dalam penelitian ini variabel Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran sebagai variabel bebas (X) dan kinerja keuangan Lembaga perkreditan desa (LPD) sebagai variabel terikat (Y). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini yaitu, variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Sedangkan variabel responsibilitas, independensi dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Jadi berdasarkan hasil rangkuman hasil dari penelitian sebelumnya di atas, maka persamaan penelitian yang saya lakukan sekarang dengan penelitian yang sebelumnya yaitu sama-sama meneliti pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi Kewajaran terhadap kinerja koperasi. Selain itu, teknik analisis yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada jenis perusahaan yang digunakan dan tahun pengamatan.

